Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling
Vol. 6, No. 2 (2026), 89-112
e-ISSN: 2808-2958 | DOI: 10.35719/sjigc.v6i2.777

Pengakuan Sosial terhadap Identitas Keagamaan Minoritas dalam Relasi Muslim Hindu melalui Pendekatan Bimbingan dan Konseling Islam di Desa Sukoreno, Jember

Nasirudin Al Ahsani[1)], Aminullah Elhady[2)], Abdul Haris[3)], Miftah Arifin[4)]
[1,2,3, 4)] UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
e-mail: nasirudin@uinkhas.ac.id

Keywords

social recognition; Muslim–Hindu relations; Honneth's recognition theory; religious minority; Islamic Guidance and Counseling; Sukoreno.

Abstract

Purpose: This study analyzes how social recognition of a Hindu religious minority is practiced in Muslim–Hindu relations in Sukoreno Village, Umbulsari, Jember, and whether the visible harmony of the village is accompanied by equal recognition. It draws on Hegel's philosophy of intersubjective recognition as the grand theory and Honneth's recognition theory (love, rights, and solidarity) as the middle-range theory. Research Approach and Method: The study employed a qualitative case-study design. Data came from four interview sessions with eight informants and four structured field reports covering eleven further informants (Muslim, Hindu, Christian, and Buddhist residents and the village head), collected in October 2023, together with observation notes and the village profile. Data were analyzed with the Miles–Huberman–Saldaña interactive model using a deductive Honneth coding frame, and credibility was supported by source and technique triangulation. Findings: Recognition of rights and social esteem is relatively strong: worship is unobstructed, government aid is described as equal, Hindu leaders speak freely in the interfaith forum, and youth of different religions guard each other's rituals. Affective recognition appears mainly in religiously mixed families and in life-cycle rituals. Recognition is nevertheless incomplete: the Hindu temple and the ogoh-ogoh parade are financed by the Hindu community itself, expression on religious matters is self-restrained, and security apparatus acts as the final safeguard in a temple dispute. Research Limitations and Implications: The study is limited to one village, 2023 data, and interview material partly mediated by student reports; no member-checking was conducted and figures on religious adherents differ across

sources. Theoretically, the findings show that recognition separates mere coexistence from respect and esteem in the study of tolerance. Practical Implications: Village governments and the interfaith harmony forum can formalize existing informal norms into transparent protocols for religious events, facilities, and aid, with minority participation in decision-making. Social Implications: Harmony that depends on personal leadership and informal norms is vulnerable; institutionalizing recognition can protect minority dignity across generations. Originality/Value: The originality of this study lies in the empirical operationalization of Honneth's three spheres, together with their absence (misrecognition), in a Javanese Muslim–Hindu village, whereas previous studies mostly stopped at harmony, ritual, or normative discussion.

Kata Kunci

Pengakuan Sosial terhadap Identitas Keagamaan Minoritas dalam Relasi Muslim Hindu melalui Pendekatan Bimbingan dan Konseling Islam di Desa Sukoreno, Jember

Abstract

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengakuan sosial terhadap minoritas Hindu dalam relasi Muslim–Hindu di Desa Sukoreno, Umbulsari, Jember, serta menguji apakah kerukunan yang tampak disertai pengakuan yang setara. Penelitian menggunakan filsafat pengakuan intersubjektif Hegel sebagai grand theory dan teori pengakuan Honneth (cinta, hak, dan solidaritas) sebagai middle-range theory. Pendekatan dan Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif. Data berasal dari empat sesi wawancara dengan delapan informan dan empat laporan lapangan terstruktur yang memuat sebelas informan lain (warga Muslim, Hindu, Kristen, Buddha, dan kepala desa) yang dihimpun pada Oktober 2023, ditambah catatan observasi dan profil desa. Data dianalisis dengan model interaktif Miles–Huberman–Saldaña menggunakan kerangka kode deduktif Honneth, dan kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Temuan Penelitian: Pengakuan hukum dan penghargaan sosial relatif kuat: ibadah tidak terhalang, bantuan pemerintah dinyatakan setara, pemuka Hindu bebas berpendapat di forum kerukunan, dan pemuda lintas agama saling menjaga ritual. Pengakuan afektif terutama tampak pada keluarga lintas agama dan ritus daur hidup. Namun, pengakuan belum penuh: pura dan pawai ogoh-ogoh dibiayai swadaya umat Hindu, ekspresi dalam isu keagamaan dibatasi secara sukarela, dan aparat keamanan menjadi

Pendahuluan

Kerukunan beragama kerap dibaca sebagai bukti bahwa relasi antarkelompok sudah sehat, padahal kerukunan yang tampak belum tentu berarti minoritas diakui sebagai subjek yang setara, dan celah inilah yang jarang diuji. Alasannya, angka makro menunjukkan paradoks. Secara global, pada 2022 sebanyak 59 dari 198 negara dan wilayah (30%) mencatat pembatasan pemerintah terhadap agama pada tingkat tinggi atau sangat tinggi, tertinggi sejak 2007, dan 45 negara (23%) mencatat permusuhan sosial yang tinggi.[1] Di Indonesia, Indeks Kerukunan Umat Beragama naik dari 73,09 (2022) menjadi 76,02 (2023),[2] tetapi SETARA Institute tetap mencatat 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan pada 2024.[3] Contoh lokal-empiris terlihat di Desa Sukoreno, Umbulsari, Jember: dari 8.956 penduduk (2019) tercatat 7.381 Muslim, 481 Katolik, dan 352 Hindu (sekitar 3,9% penduduk), dengan masjid, gereja, dan pura berjarak sekitar 200 meter.[4] Warga menyatakan tidak ada diskriminasi dan tidak ada konflik agama yang berarti, tetapi pemuka Hindu menuturkan

[1] Samirah Majumdar, *Government Restrictions on Religion Stayed at Peak Levels Globally in 2022* (Washington, DC: Pew Research Center, 2024), https://www.pewresearch.org/religion/2024/12/18/government-restrictions-on-religion-stayed-at-peak-levels-globally-in-2022/.

[2] "Menag Yaqut: Toleransi Agama di Indonesia Naik Menjadi 76 Persen," *detikHikmah*, 17 Mei 2024, https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7344195/menag-yaqut-toleransi-agama-di-indonesia-naik-menjadi-76-persen.

[3] SETARA Institute, *Siaran Pers Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2024* (Jakarta: SETARA Institute, 2025), https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2025/05/Siaran-Pers_Kondisi-KBB-2024_SETARA-Institute-1.pdf.

[4] Pemerintah Desa Sukoreno, "Profil Desa," dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)* (dokumen tidak diterbitkan, data 2019); Agustina Eka Saputri, Ravita Kurnia Dewi, dan Nadha Shofiilia, "Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari-Jember" (tugas UAS Psikologi Islam, UIN KHAS Jember, t.t.); Erica Septa Wardani, Rifda Awalia Arifin, dan Siti Aisyah Mukaromah, "Penanaman Toleransi antar Umat Beragama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember" (tugas UAS Psikologi Islam, UIN KHAS Jember, t.t.)

bahwa pura dibangun murni dengan kekuatan umatnya sendiri.[5] Karena itu, mengukur toleransi sebagai ketiadaan konflik tidak memadai, apalagi kesenjangan antara indeks makro dan pengalaman minoritas jarang diuji pada tingkat desa; yang perlu diuji adalah apakah kerukunan Sukoreno disertai pengakuan afektif, hukum, dan sosial yang setara bagi minoritas Hindu.

Riset terdahulu tentang relasi Muslim Hindu di Indonesia dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan besar. Pertama, kajian toleransi sebagai harmoni dan kearifan lokal, seperti "Muslims and Hindus Encounter on Tolerance at Glanggang Village, Pakisaji, Malang, Indonesia" yang memakai teori strukturasi Giddens,[6] dan "Religious Identity and Social Integration: An Ethnographic Study of the Balinese Hindu Community in East Lampung" yang bertumpu pada solidaritas Durkheimian.[7] Kedua, kajian ritual dan modal sosial, seperti "The Evolution of Ogoh-Ogoh Performances in Fostering Religious Tolerance"[8] dan "Cultural Agency in Postcolonial Interfaith Dynamics: The Transition from Co-Existence to Pro-Existence in Islam Hindu Relations in Kediri."[9] Ketiga, kajian negara dan diskriminasi struktural, seperti "The State and Hidden Discrimination: Islamic Preference and the Future of Religious Harmony in Southeast

[5] Wawancara dengan DH (pemuka agama Hindu, Pura Swasty Dharma), Sukoreno, 15 Oktober 2023, dalam Catatan Lapangan Tim 2 RKM 2023.

[6] Riris Masruroh dan M. Syaeful Anam, "Muslims and Hindus Encounter on Tolerance at Glanggang Village, Pakisaji, Malang, Indonesia," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 31, no. 1 (2023): 93–120, https://doi.org/10.21580/ws.31.1.16462.

[7] Anggi Novita Sari dan Deni Miharja, "Religious Identity and Social Integration: An Ethnographic Study of the Balinese Hindu Community in East Lampung," *Socio Politica* 16, no. 1 (2026): 67–78, https://doi.org/10.15575/socio-politica.v16i1.52894.

[8] Anisya Rahmadani dan Kuncoro Bayu Prasetyo, "The Evolution of Ogoh-Ogoh Performances in Fostering Religious Tolerance," *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 32, no. 1 (2024): 194–227, https://doi.org/10.19105/karsa.v32i1.12419.

[9] M. Thoriqul Huda, Asyhad Abdillah Rosyid, dan Mahamadaree Waeno, "Cultural Agency in Postcolonial Interfaith Dynamics: The Transition from Co-Existence to Pro-Existence in Islam–Hindu Relations in Kediri," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 37, no. 1 (2026): 211–32, https://doi.org/10.33367/tribakti.v37i1.8085.

Asia"[10] serta telaah pustaka "Rekognisi Axel Honneth: Gramatika Moral bagi Defisit Rasionalitas Beragama."[11] Di luar konteks keagamaan, teori Honneth telah dioperasionalkan pada partisipasi anak dan kebijakan koeksistensi multikultural di Jepang.[12] Ketiga peta ini memperlihatkan harmoni yang kaya. Namun, belum ada kajian yang menguji tiga ranah pengakuan Honneth sekaligus dengan bentuk ketiadaannya pada relasi Muslim Hindu di desa Jawa, sebagaimana diringkas pada Tabel 1; kajian pengakuan keagamaan cenderung normatif atau berskala kebijakan, sedangkan kajian lapangan berhenti pada harmoni. Penelitian ini melengkapi celah tersebut.

Tabel 1. Peta Riset Terdahulu dan Celah Penelitian

No.	Penulis (Tahun)	Fokus dan Kerangka	Celah yang Diidentifikasi
1	Masruroh dan Anam (2023)	Toleransi Muslim–Hindu di Malang; strukturasi Giddens	Menjelaskan struktur dan agen toleransi, belum menguji pengakuan hak dan penghargaan bagi minoritas.
2	Sari dan Miharja (2026)	Integrasi sosial Hindu Bali di Lampung Timur; Geertz, Durkheim, Asad	Menekankan solidaritas dan identitas, belum memeriksa ketimpangan pengakuan.
3	Rahmadani dan Prasetyo (2024)	Ogoh-ogoh dan toleransi di Pekalongan; habitus Bourdieu	Berfokus pada modal sosial dan ritual, belum membedakan toleransi dari pengakuan.
4	Huda dkk. (2026)	Relasi Islam–Hindu di Kediri; koeksistensi menuju proeksistensi	Menunjukkan solidaritas aktif, belum menelaah ranah hukum dan afektif.
5	Salayan dan Masbukin (2024)	Diskriminasi tersembunyi oleh negara; Honneth sebagai salah satu lensa	Berskala kebijakan dan bukan studi relasi Muslim–Hindu tingkat desa.

[10] Irwandra Salayan dan Masbukin, "The State and Hidden Discrimination: Islamic Preference and the Future of Religious Harmony in Southeast Asia," *Asia Pacific Journal on Religion and Society* 8, no. 2 (2024): 98–109.

[11] Diah Meitikasari dan Oktarizal Drianus, "Rekognisi Axel Honneth: Gramatika Moral bagi Defisit Rasionalitas Beragama," *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 6, no. 1 (2021): 24–47.

[12] Nigel Thomas, "Love, Rights and Solidarity: Studying Children's Participation Using Honneth's Theory of Recognition," *Childhood* 19, no. 4 (2012): 453–66, https://doi.org/10.1177/0907568211434604; Hiroyuki Ishimatsu, "Beyond Multiculturalism? Rethinking Japan's 'Tabunka-Kyōsei' through Axel Honneth's Theory of Recognition," *Frontiers in Sociology* 10 (2025): 1653520, https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1653520.

No.	Penulis (Tahun)	Fokus dan Kerangka	Celah yang Diidentifikasi
6	Meitikasari dan Drianus (2021)	Honneth dan moderasi beragama; kajian pustaka	Normatif; belum diuji dengan data lapangan.

Berdasarkan pemetaan tersebut dan metode studi kasus kualitatif dengan analisis tematik berkerangka Honneth, penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan bentuk pengakuan afektif, hukum, dan penghargaan sosial terhadap umat Hindu dalam kehidupan Muslim Hindu di Desa Sukoreno; (2) mengidentifikasi bentuk pengakuan yang belum penuh (*misrecognition*) beserta konteks yang melatarinya; dan (3) merumuskan implikasi teoretis tentang perbedaan toleransi sebagai hidup berdampingan dan pengakuan sebagai penghormatan atas martabat, hak, dan kontribusi kelompok lain.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah desa, Kelompok Umat Beragama (KUB) tingkat desa, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) karena menyediakan peta tiga ranah pengakuan yang dapat dipakai untuk memeriksa kebijakan, distribusi bantuan, dan tata kelola kegiatan keagamaan secara lebih adil, serta bagi masyarakat karena menegaskan bahwa kerukunan perlu dilengkapi jaminan yang melindungi martabat minoritas. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada studi komunikasi dan relasi antaragama dengan menggeser pembacaan kerukunan dari harmoni ke pengakuan, mengoperasionalkan Hegel dan Honneth pada konteks desa Muslim Hindu di Jawa, dan mengisi kekosongan literatur yang selama ini belum menguji tiga ranah pengakuan beserta ketiadaannya secara empiris.

Kajian Teori

Dari Toleransi ke Pengakuan

Toleransi lazim dipahami sebagai sikap membiarkan keyakinan yang berbeda tanpa menyetujuinya. Forst membedakan empat konsepsi toleransi: *permission* (izin dari pihak dominan), *coexistence* (hidup berdampingan demi damai), *respect* (penghormatan moral atas pihak lain sebagai setara), dan *esteem* (penghargaan atas

nilai keyakinan pihak lain).[13] Dua konsepsi pertama mempertahankan relasi kuasa antara yang menoleransi dan yang ditoleransi, sedangkan dua yang terakhir mendekati pengakuan. Galeotti menegaskan bahwa toleransi yang sejati adalah pengakuan publik atas identitas yang berbeda,[14] sejalan dengan Taylor yang memandang nonpengakuan sebagai bentuk penindasan.[15] Menchik, dalam konteks Indonesia, mengajukan bahwa toleransi dapat tumbuh tanpa liberalisme politik,[16] yang berarti kerukunan tidak otomatis menjamin kesetaraan.

Grand Theory: Pengakuan Intersubjektif Hegel

Hegel mengembangkan gagasan pengakuan (*Anerkennung*) dalam periode pergolakan setelah Revolusi Prancis. Menurutnya, kesadaran diri tidak terbentuk secara terisolasi, melainkan hanya ketika diakui oleh kesadaran diri lain; pengakuan sepihak, seperti dalam relasi tuan dan hamba, gagal memenuhi kebutuhan akan pengakuan.[17] Dalam *Elements of the Philosophy of Right*, kebebasan diwujudkan dalam kehidupan etis (*Sittlichkeit*) melalui keluarga, masyarakat sipil, dan negara.[18] Implikasinya bagi penelitian ini, hidup berdampingan tanpa saling mengakui sebagai subjek bebas bersifat tidak lengkap, dan minoritas yang hanya "diizinkan" hadir belum memperoleh pengakuan yang timbal balik.

---

[13] Rainer Forst, *Toleration in Conflict: Past and Present*, terj. Ciaran Cronin (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

[14] Anna Elisabetta Galeotti, *Toleration as Recognition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).

[15] Charles Taylor, "The Politics of Recognition," dalam *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, ed. Amy Gutmann (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), 25.

[16] Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

[17] G. W. F. Hegel, *Phenomenology of Spirit*, terj. A. V. Miller (Oxford: Oxford University Press, 1977), ¶178–96.

[18] G. W. F. Hegel, *Elements of the Philosophy of Right*, ed. Allen W. Wood, terj. H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), ¶157–360.

Middle-Range Theory: Teori Pengakuan Axel Honneth

Honneth, tokoh generasi ketiga Teori Kritis Mazhab Frankfurt, menghidupkan kembali gagasan Hegel di Jena dengan bantuan psikologi sosial George Herbert Mead. Ia membedakan tiga pola pengakuan: cinta (*love*) dalam relasi dekat yang menumbuhkan kepercayaan diri, hak (*rights*) yang menumbuhkan penghormatan diri sebagai subjek hukum yang setara, dan solidaritas (*solidarity*) atau penghargaan sosial yang menumbuhkan harga diri melalui apresiasi atas kemampuan dan kontribusi.[19] Ketiganya memiliki bentuk penyangkalan: pelanggaran integritas, penyangkalan hak dan pengucilan, serta perendahan cara hidup.[20] Konflik sosial, menurut Honneth, juga berakar pada pengalaman tidak dihargai dan tidak semata pada perebutan sumber daya material. Fraser mengingatkan bahwa pengakuan perlu dibaca bersama redistribusi,[21] sehingga penelitian ini juga memperhatikan pendanaan dan akses sumber daya. Dalam konteks multireligius, cinta tidak disamakan dengan keramahan umum karena berkaitan dengan relasi afektif dekat seperti keluarga dan persahabatan, sedangkan hak tidak diperiksa dari pernyataan bahwa masyarakat rukun, melainkan dari pengakuan hak yang nyata.

Nilai Islam sebagai Lensa Emik

Informan Muslim merumuskan sikapnya dengan kosakata nilai Islam: *tasamuh* (toleransi), *al-'adl* (keadilan), dan *al-musawah* (kesetaraan). Rujukan normatifnya antara lain "bagimu agamamu, dan bagiku agamaku" (Q 109:6), larangan paksaan dalam beragama (Q 2:256), dan kebolehan berbuat baik serta adil kepada non-Muslim yang tidak memerangi (Q 60:8). Nilai-nilai ini diperlakukan sebagai lensa emik untuk memahami motivasi perilaku, bukan sebagai kerangka analisis utama.

Kerangka Analitis

---

[19] Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, terj. Joel Anderson (Cambridge: Polity Press, 1995), 92–130.

[20] Honneth, *The Struggle for Recognition*, 131–39.

[21] Nancy Fraser dan Axel Honneth, *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange* (London: Verso, 2003).

Kerangka analitis penelitian menurunkan teori Hegel dan Honneth ke dalam indikator operasional yang disusun dari matriks penelitian (Tabel 2).

Tabel 2. Kerangka Analitis Pengakuan dan Indikator Operasional

Ranah	Definisi Operasional	Indikator	Bentuk Ketiadaan
Afektif (*love*)	Perhatian dan kepedulian dalam relasi dekat yang menjaga rasa aman dan percaya diri	Penerimaan keluarga lintas agama; kehadiran dalam peristiwa hidup dan kematian; kepedulian antartetangga	Pengucilan dalam relasi dekat; keraguan atau kerahasiaan
Hukum (*rights*)	Pengakuan sebagai subjek berkedudukan setara dalam kebebasan, layanan, dan suara	Kebebasan ibadah; kesetaraan layanan dan bantuan; kebebasan berpendapat di forum; akses administrasi	Pembatasan ekspresi; perlakuan administratif berbeda; ketergantungan pada izin
Penghargaan sosial (*solidarity*)	Apresiasi atas identitas dan kontribusi kelompok dalam kehidupan bersama	Partisipasi dalam kegiatan agama lain; pengamanan ritual bersama; penghargaan atas tradisi	Kontribusi tidak dihargai dalam keputusan atau dukungan; pelabelan

Metode Penelitian

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental.[22] Pendekatan ini dipilih karena pertanyaan penelitian menyangkut makna dan pengalaman diakui atau tidak diakui, yang tidak dapat diukur dengan angka, dan karena Sukoreno merupakan kasus terbatas yang kerap disebut desa toleran sehingga layak diuji kedalaman pengakuannya. Pelaksanaannya: peneliti menurunkan teori Honneth ke dalam kerangka kode, memeriksa data lapangan yang telah dihimpun, lalu menilai kecukupan data pada setiap ranah pengakuan.

[22] Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, ed. ke-6 (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2018); John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, ed. ke-4 (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2018).

Objek Material dan Objek Formal

Objek material penelitian adalah relasi sosial warga Muslim dan Hindu, dengan warga Katolik dan Kristen sebagai konteks, di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Unit analisisnya mencakup kasus dan peristiwa (pawai ogoh-ogoh, Nyepi, Dharmasanti, tahlilan, Grebek Suro, dan sengketa pembangunan pura), institusi (KUB desa, rapat RT, sekolah dasar Katolik, pura, dan masjid), kelompok (umat Hindu di sekitar Pura Swasty Dharma dan warga Muslim tetangganya), serta artefak (profil desa dan matriks penelitian). Objek formalnya adalah pengakuan sosial dalam tiga ranah Honneth beserta ketiadaannya.

Sumber Informasi

Sumber informasi terdiri atas partisipan dan dokumen (Tabel 3). Pemilihan informan bersifat purposif dan sebagian oportunistik: tim lapangan menyasar pemuka agama, pengurus KUB, dan tetangga dekat pura, sementara salah satu informan Hindu diwawancarai karena rumahnya dekat pura dan kebetulan dapat ditemui. Nama informan disamarkan dengan inisial.

Tabel 3. Sumber Informasi Penelitian

Sumber	Komposisi	Peran dalam Analisis
Catatan lapangan Tim 2 RKM 2023 (14–15 Oktober 2023)	4 sesi wawancara, 8 informan: 6 Muslim (warga, pemuka, dan penyuluh agama) dan 2 Hindu (warga dan pemuka); durasi sesi terekam 18 dan 35 menit	Data primer utama; dasar pelaporan temuan
Empat laporan lapangan terstruktur mahasiswa	11 informan: kepala desa (1), Hindu (4), Muslim (3), Kristen (2), Buddha (1)	Data pembanding lintas agama; hanya pernyataan yang diatribusikan kepada informan yang dipakai
Profil Desa (RPJM, data 2019)	Demografi, ekonomi, pendidikan, kelembagaan	Konteks administratif dan sosial
Matriks penelitian RKM 2023	Variabel dan indikator tanggung jawab, kebebasan, keadilan	Dasar penurunan indikator

Proses Pengumpulan Data

Data dikumpulkan oleh Tim 2 Riset Kolaboratif (RKM) UIN KHAS Jember pada 14–15 Oktober 2023 berdasarkan matriks penelitian yang disusun penulis. Prosesnya mencakup observasi suasana fisik dan suasana informan, wawancara semi-terstruktur dalam bahasa Indonesia dan Jawa Krama, perekaman suara melalui telepon genggam pada sesi tertentu, pencatatan lapangan, dan penelusuran dokumen desa. Empat laporan mahasiswa Psikologi Islam menjadi data sekunder terstruktur karena disusun dari rangkaian pertanyaan baku tentang toleransi, kebebasan, keadilan, dan diskriminasi. Laporan tersebut memuat paragraf teoretis dan narasi mahasiswa, sehingga hanya pernyataan yang jelas diatribusikan kepada informan yang dijadikan bukti.

Data dan Analisis

Analisis memakai model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña: kondensasi data melalui pengodean, penyajian data dalam matriks, dan penarikan serta verifikasi simpulan.[23] Pengodean bersifat deduktif berdasarkan empat kode (cinta, hak, solidaritas, dan ketiadaan pengakuan) dengan subtema induktif. Setiap ranah dinilai kecukupan datanya (kuat, terbatas, atau perlu pendalaman). Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber (Muslim, Hindu, Kristen, Buddha, dan pejabat desa), triangulasi teknik (observasi, wawancara, dokumen), serta pencatatan pernyataan yang saling bertentangan sebagai kasus negatif. Keterbatasan data dinyatakan terbuka: angka penganut Hindu berbeda antarsumber (352 jiwa pada satu laporan dan 325 jiwa pada laporan lain, serta sekitar lima keluarga untuk Pura Swasty Dharma menurut pemuka Hindu), sehingga artikel memakai 352 jiwa dengan catatan bahwa angka ini perlu diverifikasi pada data Kementerian Agama atau Disdukcapil; member-checking belum dilakukan; dan laporan tertentu memuat batas administratif yang berbeda dari profil desa, sehingga profil desa dijadikan rujukan resmi.

Hasil Penelitian

[23] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. ke-3 (Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014).

Konteks Desa dan Lanskap Keagamaan

Desa Sukoreno terletak di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, seluas 836,862 hektare, terdiri atas tiga dusun (Krajan Kidul, Krajan Lor, dan Kandangrejo), 21 RW, dan 85 RT; batasnya Desa Mundurejo di utara, Gunungsari di timur, Wonorejo di selatan, dan Wringin Agung di barat.[24] Pada 2019 penduduknya 8.956 jiwa dalam 2.618 keluarga, dan 913 keluarga (34,9%) tergolong miskin. Mata pencaharian terbanyak adalah petani (1.657 laki-laki dan 1.123 perempuan), dan hanya 261 jiwa (3,8% dari 6.814 penduduk dalam tabel pendidikan) yang tamat akademi atau perguruan tinggi.[25] Komposisi agama pada Tabel 4 bersumber dari laporan mahasiswa dan dihitung terhadap total penduduk 2019; selisih 742 jiwa tidak dirinci dalam sumber.

Tabel 4. Komposisi Penduduk Menurut Agama (Estimasi)

Agama	Jiwa	% dari 8.956	Catatan
Islam	7.381	82,4	Laporan Saputri dkk.
Katolik	481	5,4	Laporan Saputri dkk.
Hindu	352	3,9	325 jiwa pada laporan lain
Tidak dirinci	742	8,3	Selisih terhadap total penduduk

Di desa ini terdapat masjid, gereja, dan pura yang berjarak sekitar 200 meter; informan menyebut dua pura, dan pura yang besar berada dekat gereja.[26] Di sebuah sekolah dasar Katolik yang tidak khusus bagi satu agama, siswa Hindu, Muslim, dan

24 Pemerintah Desa Sukoreno, “Profil Desa.”

25 Pemerintah Desa Sukoreno, “Profil Desa.”

26 Wardani, Arifin, dan Mukaromah, “Penanaman Toleransi”; Wawancara dengan SR (warga Muslim), Sukoreno, 14 Oktober 2023.

Kristen belajar bersama; pada hari Jumat siswa Hindu berkebaya, siswa Muslim berbusana muslim dan mengaji, dan siswa Kristen berpakaian biasa.[27]

Pengakuan Afektif (Cinta)

Pemuka Hindu menuturkan bahwa dalam satu keluarga kadang terdapat dua keyakinan, misalnya orang tua beragama Hindu dan salah satu anak beragama Islam, dan "semuanya berjalan damai tidak ada masalah dalam kehidupan keluarga mereka."[28] Kehadiran lintas agama paling terlihat pada peristiwa kematian. Ketika ada warga Muslim meninggal, warga Katolik dan Hindu ikut berkumpul saat tahlilan; ketika keluarga Hindu berhajat, warga Muslim dan Katolik diundang. Pada hari ketiga dan ketujuh, pihak lain turut diundang, dan di salah satu gang warga Muslim mengikuti prosesi duka Hindu setiap hari.[29] Setiap pihak berdoa menurut caranya, dan "kalau Islam ya doa sendiri."[30] Selain itu, warga Muslim memberi makanan dan minuman saat umat Hindu bergotong royong di pura.[31] Seorang informan yang bekerja di sekolah menuturkan bahwa ia mengizinkan murid Muslim melaksanakan salat duha dan menegur murid yang bergurau saat berdoa.[32] Data afektif berasal terutama dari keluarga campuran dan ritus kematian; pengalaman emosional anggota keluarga beda agama belum terungkap langsung.

---

27 Wawancara dengan SR, 14 Oktober 2023.

[28] Wawancara dengan DH, 15 Oktober 2023.

[29] Wawancara dengan SL (warga Hindu, petani), NR (warga Muslim, petani), Sukoreno, 15 Oktober 2023.

[30] Wawancara dengan SR, 14 Oktober 2023.

[31] Haslina Masturo, Alif Wahyu Setya Ningrum, dan Kurnia Aisyah Amalia, "Toleransi Agama Islam terhadap Agama Hindu dalam Perayaan Tradisi Ogoh-Ogoh di Desa Sukoreno, Kec. Umbulsari, Kab. Jember" (tugas UAS Psikologi Islam, UIN KHAS Jember, t.t.), wawancara dengan BG (warga Hindu).

[32] Wardani, Arifin, dan Mukaromah, "Penanaman Toleransi."

Pengakuan Hukum (Hak)

Informan menyatakan tidak ada gangguan beribadah dan tidak ada momen umat Hindu merasa dirugikan.[33] Terkait layanan, jawaban atas pertanyaan tentang kesetaraan layanan politik, pendidikan, dan ekonomi adalah "sama, bantuan pemerintah disamakan, ngga ada yang beda."[34] Pemuka Hindu menyatakan bahwa di forum KUB (tingkat desa) dan FKUB (tingkat kabupaten) "kita sama dengan yang lain, kita bebas berpendapat," selama berkaitan dengan keagamaan.[35] Pawai ogoh-ogoh memerlukan pemberitahuan kepada bupati, camat, dan desa, yang dinilai "sangat sakral," dan warga Hindu menyatakan izin dari ketua RT diperoleh.[36] Panggilan Tri Sandhya memakai pengeras suara tiga kali sehari (pukul 06.00, 12.00, dan 18.00), sedangkan azan dan tadarus juga memakai pengeras suara; setelah tetangga Hindu mengeluh tidak bisa tidur, pengeras suara tadarus di satu gang dimatikan.[37] Dalam urusan administrasi, informan Hindu menyebut kesulitan pada berkas pernikahan di dinas kependudukan, tetapi tetap memperoleh pengarahan, sedangkan pembuatan KTP tidak dipersulit.[38] Laporan lain mencatat bahwa pemangku menerima bantuan pemerintah setiap tiga

[33] Wawancara dengan SL, NR, 15 Oktober 2023; Wawancara dengan DH, 15 Oktober 2023.

34 Wawancara dengan SL, AR (warga Muslim, petani dan pedagang), NR, Sukoreno, 15 Oktober 2023.

35 Wawancara dengan DH, 15 Oktober 2023.

36 Wawancara dengan SL, AR, NR, 15 Oktober 2023; Masturo, Ningrum, dan Amalia, "Toleransi Agama Islam terhadap Agama Hindu", wawancara dengan BG.

37 Wawancara dengan DH, 15 Oktober 2023; Wawancara dengan SH (pemuka agama Muslim dan pengurus KUB Sukoreno), Sukoreno, 15 Oktober 2023; Karimah Dalilah N.R., Kamalia Nabata, dan Nadila Farahiyah, "Perspektif Masyarakat di Desa Sukoreno Umbulsari yang Memegang Teguh Keyakinan Sendiri tentang Pernikahan Beda Agama yang Terjadi di Indonesia" (tugas UAS Psikologi Islam, UIN KHAS Jember, t.t.)

38 Masturo, Ningrum, dan Amalia, "Toleransi Agama Islam terhadap Agama Hindu", wawancara dengan BG.

bulan.[39] Rapat RT dibuka menurut agama pemimpinnya, dengan waktu masing-masing dan tanpa saling berebut.[40]

Penghargaan Sosial (Solidaritas)

Informan menyatakan bahwa pemuda dari berbagai agama ikut menjaga keamanan acara agama masing-masing, dan tidak ada pecalang.[41] Ketika ditanya apakah ada momen umat Hindu merasa dirugikan pada acara agama lain, informan Hindu menjawab tidak, bahkan "malah senang kalau minta dibantu"; warga Muslim pun senang bila ogoh-ogoh digelar dan "kalau ngga ada malah ditanyain," sedangkan warga Katolik yang membutuhkan pengamanan acara dibantu pemuda.[42] Warga Muslim tidak membuat keributan saat Nyepi, dan umat Hindu serta Katolik tidak mengganggu acara Muslim.[43] Setiap tahun desa menyelenggarakan Grebek Suro, yang menurut laporan diikuti 20 parade yang masing-masing berjumlah 100–200 orang dan melibatkan Islam, Kristen, Buddha, Hindu, serta penghayat Sapta Darma, dengan tampilan Bala Ganjur oleh umat Hindu.[44] Warga membersihkan tempat ibadah bersama, dan setiap tahun H-3 hari raya desa dibersihkan bersama.[45] Batas pergaulan dinyatakan jelas: bergurau diperbolehkan, tetapi "kalau menyinggung agama, tidak dan jangan sampai."[46] Terhadap pendatang Muslim yang intoleran, informan menyatakan "pasti ada yang menegur."[47]

Pengakuan yang Belum Penuh

---

39 Masturo, Ningrum, dan Amalia, "Toleransi Agama Islam terhadap Agama Hindu."

40 Wawancara dengan SL, AR, NR, 15 Oktober 2023.

41 Wawancara dengan SL, AR, NR, 15 Oktober 2023.

42 Wawancara dengan SL, AR, NR, 15 Oktober 2023.

43 Saputri, Dewi, dan Shofiilia, "Toleransi Antar Umat Beragama."

44 Dalilah, Nabata, dan Farahiyah, "Perspektif Masyarakat."

45 Wardani, Arifin, dan Mukaromah, "Penanaman Toleransi"; Saputri, Dewi, dan Shofiilia, "Toleransi Antar Umat Beragama."

46 Wawancara dengan SL, NR, 15 Oktober 2023.

47 Wawancara dengan SL, NR, AR, 15 Oktober 2023.

Beberapa data menunjukkan pengakuan yang belum penuh atau ambigu. Pertama, pemuka Hindu menyatakan bahwa pura dibangun "murni dari kekuatan umat sendiri" dan tetangga non-Hindu tidak ikut campur,[48] sedangkan informan Hindu lain menyebut umat Islam membantu dengan makanan dan minuman.[49] Kedua, pawai ogoh-ogoh dibiayai dari iuran umat, bukan dari fasilitas pemerintah.[50] Ketiga, dalam sengketa pembangunan pura baru, pengurus KUB menyebut bahwa gesekan terjadi di antara sesama Hindu, umat Islam sebenarnya juga tidak setuju, persoalan ditutup secara internal oleh tokoh Hindu hingga pondasi dibongkar, dan jika dilanjutkan "langsung babinsa bertindak."[51] Keempat, tim lapangan mencatat kesan bahwa pada sarasehan di balai desa pemuka Muslim tidak dapat berbicara seluas di rumah karena menghargai pemuka agama lain, dan bahwa pemuka Hindu tampak ragu dan terbata-bata pada pertanyaan yang dirasa sensitif.[52] Kelima, pengurus KUB menuturkan pernah mendengar, bukan menyaksikan langsung, bahwa sebagian pihak Katolik menyebut orang di luar golongannya "domba atau kambing sesat."[53] Keenam, ketika ditanya tentang program desa terkait keberagaman agama, pengurus KUB menyebut tawaran kerja sama kebun dari perguruan tinggi dan menamainya "wacana," sehingga program desa khusus keberagaman agama tidak teridentifikasi dalam data.[54] Pemuka Hindu juga menyebut umatnya kecil dan memilih mandiri agar maju.[55]

---

[48] Wawancara dengan DH, 15 Oktober 2023.

[49] Masturo, Ningrum, dan Amalia, "Toleransi Agama Islam terhadap Agama Hindu", wawancara dengan BG.

[50] Wawancara dengan SL, AR, NR, 15 Oktober 2023.

[51] Wawancara dengan SH, 15 Oktober 2023.

[52] Catatan Lapangan Tim 2 RKM 2023, deskripsi suasana informan SH dan DH, 15 Oktober 2023.

[53] Wawancara dengan SH, 15 Oktober 2023.

[54] Wawancara dengan SH, 15 Oktober 2023.

[55] Wawancara dengan DH, 15 Oktober 2023.

Tabel 5. Ringkasan Temuan dan Kecukupan Data

Ranah	Temuan Utama	Kecukupan Data
Afektif	Keluarga campuran; kehadiran dalam ritus kematian; kepedulian antartetangga	Terbatas
Hukum	Ibadah bebas; bantuan setara; kebebasan berpendapat di KUB/FKUB; pemberitahuan acara; kendala administrasi pernikahan	Relatif kuat
Penghargaan sosial	Pengamanan bersama; Grebek Suro; kebersihan tempat ibadah; batas gurauan; teguran sosial	Relatif kuat
Ketiadaan pengakuan	Pura dan ogoh-ogoh swadaya; kesan pembatasan ekspresi; babinsa sebagai pengaman; program khusus belum teridentifikasi	Perlu pendalaman

Pembahasan

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa kerukunan Sukoreno terwujud kuat pada ranah hak dan penghargaan sosial, terbatas pada ranah afektif, dan menyisakan bentuk pengakuan yang belum penuh. Pembahasan ini tidak mengulang temuan, melainkan menafsirkannya dengan Hegel sebagai grand theory dan Honneth sebagai middle-range theory untuk menjawab apakah kerukunan yang tampak sama dengan pengakuan.

Yang Tak Terduga dan Kebaruan Temuan

Ada empat hal tak terduga. Pertama, berbeda dengan harapan Honneth bahwa pengalaman tidak dihargai memicu klaim, minoritas Hindu justru menuturkan tidak dirugikan sambil menanggung sendiri pembiayaan pura dan ogoh-ogoh dan menyebut kemandirian sebagai jalan untuk maju. Kedua, ketiadaan campur tangan tetangga non-Hindu dalam pembangunan pura dapat dibaca sebagai penghormatan atas otonomi, berbeda dengan studi di Pekalongan dan Kediri yang menonjolkan partisipasi Muslim dalam menyiapkan ritual Hindu.[56] Ketiga, sengketa pura di Sukoreno ditutup secara

[56] Rahmadani dan Prasetyo, "The Evolution of Ogoh-Ogoh Performances"; Huda, Rosyid, dan Waeno, "Cultural Agency in Postcolonial Interfaith Dynamics."

internal dengan babinsa sebagai pengaman terakhir, sedangkan di Malang sengketa pendirian pura diselesaikan lewat musyawarah deliberatif.[57] Keempat, berdasarkan kesan tim lapangan, pengakuan menghasilkan sikap menahan diri: pemuka Muslim membatasi ekspresinya di forum karena menghargai pemuka lain. Kebaruannya terkait celah di pendahuluan: penelitian terdahulu berhenti pada harmoni, ritual, atau diskusi normatif, sedangkan penelitian ini menguji tiga ranah pengakuan dan ketiadaannya sekaligus pada data lapangan.

So-What 1: Temuan sebagai Tanda Kenyataan Sosial

Temuan ini menjadi tanda dari tatanan sosial yang fungsional pada tingkat integrasi, tetapi berpotensi disfungsional pada tingkat jaminan. Dalam kerangka Forst, praktik Sukoreno bergerak antara konsepsi koeksistensi dan penghormatan, sementara kewajiban memberi tahu bupati, camat, dan desa bagi ritual Hindu masih berdekatan dengan konsepsi izin.[58] Dalam kerangka Hegel, solidaritas ritual yang kuat menunjukkan kehidupan etis yang bekerja pada ranah masyarakat sipil, tetapi kehadiran babinsa dan pembiayaan swadaya memperlihatkan bahwa pengakuan negara dan kelembagaan belum menopang sepenuhnya.[59] Hal ini sejalan dengan pembacaan Ishimatsu bahwa kebijakan koeksistensi yang bertumpu pada pertukaran dan saling pengertian perlu dilengkapi pengakuan kelembagaan dan solidaritas sosial,[60] dan dengan peringatan Salayan dan Masbukin tentang struktur yang tampak netral tetapi menimbulkan ketimpangan.[61] Peran pemuka agama sebagai mediator, misalnya pemuka Muslim yang mematikan pengeras suara tadarus dan pemuka Hindu yang mengajarkan keselarasan, penting karena tinjauan Köbrich dan Hoffmann menunjukkan aktor dan institusi

[57] Masruroh dan Anam, "Muslims and Hindus Encounter on Tolerance."

[58] Forst, *Toleration in Conflict*.

[59] Hegel, *Elements of the Philosophy of Right*, ¶157–360.

[60] Ishimatsu, "Beyond Multiculturalism?"

[61] Salayan dan Masbukin, "The State and Hidden Discrimination."

keagamaan masih sedikit dikaji.[62] Penggunaan tiga ranah Honneth sebagai alat empiris juga memiliki preseden pada studi partisipasi anak.[63]

So-What 2: Temuan sebagai Prakondisi dan Rekomendasi

Temuan ini juga dapat menjadi peringatan. Jika pengakuan bertumpu pada pemuka dan norma lisan, peralihan generasi atau perubahan kepemimpinan dapat melemahkannya, apalagi tren global menunjukkan pembatasan dan permusuhan terhadap agama berada pada puncaknya,[64] sedangkan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia masih mencapai ratusan peristiwa setahun.[65] Rekomendasinya: (1) pemerintah desa dan KUB menuliskan protokol kegiatan keagamaan, termasuk pemberitahuan acara dan norma pengeras suara; (2) distribusi bantuan, termasuk dukungan bagi pemangku dan kegiatan budaya seperti ogoh-ogoh, dicatat dengan kriteria yang transparan dan netral agama; (3) perwakilan Hindu dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa, tidak hanya dalam acara kerukunan; (4) praktik sekolah yang mengakomodasi ibadah semua murid didokumentasikan sebagai contoh; dan (5) riset lanjutan menggali pengalaman anggota keluarga beda agama dan generasi muda Hindu.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerukunan Muslim Hindu di Sukoreno bukan sekadar hidup berdampingan, tetapi belum sepenuhnya merupakan pengakuan yang setara. Pengakuan hukum dan penghargaan sosial relatif kuat melalui kebebasan ibadah, bantuan yang dinyatakan setara, kebebasan berpendapat di forum kerukunan, serta pengamanan dan partisipasi ritual lintas agama; pengakuan afektif tampak terbatas pada keluarga campuran dan ritus kematian. Pada saat yang sama, pura dan

---

[62] Julia Köbrich dan Lisa Hoffmann, "What Do We Know about Religion and Interreligious Peace? A Review of the Quantitative Literature," *Politics and Religion* 16, no. 4 (2023): 708–32, https://doi.org/10.1017/S1755048323000238.

[63] Thomas, "Love, Rights and Solidarity."

[64] Majumdar, *Government Restrictions on Religion*.

[65] SETARA Institute, *Siaran Pers Kondisi KBB 2024*.

ogoh-ogoh yang dibiayai swadaya, ekspresi yang dibatasi, dan babinsa sebagai pengaman terakhir menunjukkan pengakuan yang belum penuh, sehingga ketiga tujuan penelitian terjawab.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan Hegel–Honneth memberi pembeda analitis antara koeksistensi dan penghormatan dalam studi toleransi serta memperlihatkan bahwa ketiadaan konflik tidak identik dengan pengakuan. Secara praktis, pemerintah desa, KUB, dan FKUB direkomendasikan melembagakan norma informal menjadi protokol tertulis, membuka transparansi bantuan, dan melibatkan minoritas dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan: satu desa, data 2023, materi wawancara yang sebagian dimediasi laporan mahasiswa, angka penganut yang berbeda antarsumber, ranah afektif yang tipis, dan belum adanya member-checking. Penelitian lanjutan disarankan melakukan wawancara mendalam dengan keluarga beda agama, warga Hindu biasa, tokoh Muslim, dan aparatur desa tentang pengalaman dihormati, diperlakukan tidak adil, dan dihargai kontribusinya, memverifikasi data kependudukan, serta membandingkan Sukoreno dengan desa multiagama lain.

Daftar Pustaka

Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2018.

"Menag Yaqut: Toleransi Agama di Indonesia Naik Menjadi 76 Persen." *detikHikmah*, 17 Mei 2024. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7344195/menag-yaqut-toleransi-agama-di-indonesia-naik-menjadi-76-persen.

Forst, Rainer. *Toleration in Conflict: Past and Present*. Diterjemahkan oleh Ciaran Cronin. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Fraser, Nancy, dan Axel Honneth. *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*. London: Verso, 2003.

Galeotti, Anna Elisabetta. *Toleration as Recognition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Hegel, G. W. F. *Elements of the Philosophy of Right*. Disunting oleh Allen W. Wood. Diterjemahkan oleh H. B. Nisbet. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Hegel, G. W. F. *Phenomenology of Spirit*. Diterjemahkan oleh A. V. Miller. Oxford: Oxford University Press, 1977.

Honneth, Axel. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Diterjemahkan oleh Joel Anderson. Cambridge: Polity Press, 1995.

Huda, M. Thoriqul, Asyhad Abdillah Rosyid, dan Mahamadaree Waeno. "Cultural Agency in Postcolonial Interfaith Dynamics: The Transition from Co-Existence to Pro-Existence in Islam–Hindu Relations in Kediri." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 37, no. 1 (2026): 211–32. https://doi.org/10.33367/tribakti.v37i1.8085.

Ishimatsu, Hiroyuki. "Beyond Multiculturalism? Rethinking Japan's 'Tabunka-Kyōsei' through Axel Honneth's Theory of Recognition." *Frontiers in Sociology* 10 (2025): 1653520. https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1653520.

Köbrich, Julia, dan Lisa Hoffmann. "What Do We Know about Religion and Interreligious Peace? A Review of the Quantitative Literature." *Politics and Religion* 16, no. 4 (2023): 708–32. https://doi.org/10.1017/S1755048323000238.

Majumdar, Samirah. *Government Restrictions on Religion Stayed at Peak Levels Globally in 2022*. Washington, DC: Pew Research Center, 2024. https://www.pewresearch.org/religion/2024/12/18/government-restrictions-on-religion-stayed-at-peak-levels-globally-in-2022/.

Masruroh, Riris, dan M. Syaeful Anam. "Muslims and Hindus Encounter on Tolerance at Glanggang Village, Pakisaji, Malang, Indonesia." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 31, no. 1 (2023): 93–120. https://doi.org/10.21580/ws.31.1.16462.

Meitikasari, Diah, dan Oktarizal Drianus. "Rekognisi Axel Honneth: Gramatika Moral bagi Defisit Rasionalitas Beragama." *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 6, no. 1 (2021): 24–47.

Menchik, Jeremy. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014.

Rahmadani, Anisya, dan Kuncoro Bayu Prasetyo. "The Evolution of Ogoh-Ogoh Performances in Fostering Religious Tolerance." *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 32, no. 1 (2024): 194–227. https://doi.org/10.19105/karsa.v32i1.12419.

Salayan, Irwandra, dan Masbukin. "The State and Hidden Discrimination: Islamic Preference and the Future of Religious Harmony in Southeast Asia." *Asia Pacific Journal on Religion and Society* 8, no. 2 (2024): 98–109.

Sari, Anggi Novita, dan Deni Miharja. "Religious Identity and Social Integration: An Ethnographic Study of the Balinese Hindu Community in East Lampung." *Socio Politica* 16, no. 1 (2026): 67–78. https://doi.org/10.15575/socio-politica.v16i1.52894.

SETARA Institute. *Siaran Pers Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) 2024*. Jakarta: SETARA Institute, 2025. https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2025/05/Siaran-Pers_Kondisi-KBB-2024_SETARA-Institute-1.pdf.

Taylor, Charles. "The Politics of Recognition." Dalam *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, disunting oleh Amy Gutmann, 25–73. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.

Thomas, Nigel. "Love, Rights and Solidarity: Studying Children's Participation Using Honneth's Theory of Recognition." *Childhood* 19, no. 4 (2012): 453–66. https://doi.org/10.1177/0907568211434604.

Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Edisi ke-6. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2018.

Sumber Data Lapangan dan Dokumen

Catatan Lapangan Tim 2 RKM 2023. Wawancara di Desa Sukoreno, Umbulsari, Jember, 14–15 Oktober 2023. Dokumen tidak diterbitkan.

Dalilah, Karimah, Kamalia Nabata, dan Nadila Farahiyah. "Perspektif Masyarakat di Desa Sukoreno Umbulsari yang Memegang Teguh Keyakinan Sendiri tentang Pernikahan Beda Agama yang Terjadi di Indonesia." Tugas UAS Psikologi Islam, UIN KHAS Jember, t.t.

Masturo, Haslina, Alif Wahyu Setya Ningrum, dan Kurnia Aisyah Amalia. "Toleransi Agama Islam terhadap Agama Hindu dalam Perayaan Tradisi Ogoh-Ogoh di

Desa Sukoreno, Kec. Umbulsari, Kab. Jember." Tugas UAS Psikologi Islam, UIN KHAS Jember, t.t.

Pemerintah Desa Sukoreno. "Profil Desa." Dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*. Dokumen tidak diterbitkan, data 2019.

Saputri, Agustina Eka, Ravita Kurnia Dewi, dan Nadha Shofiilia. "Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari-Jember." Tugas UAS Psikologi Islam, UIN KHAS Jember, t.t.

Wardani, Erica Septa, Rifda Awalia Arifin, dan Siti Aisyah Mukaromah. "Penanaman Toleransi antar Umat Beragama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember." Tugas UAS Psikologi Islam, UIN KHAS Jember, t.t.